

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Press.
- Apresziyanti, D., & Gustiana, A. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Asmawiah, S. H., & Sulistiyo, H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4150-4157.
- Asyiah, N. (2018). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). 18-25.
- Cahyani, A. P. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt dengan Managerial Ownership Sebagai Variabel Moderasi. *Universitas pendidikan Indonesia*.
- Caraka, R. E. (2017). *Spatial Data Panel*. Ponorogo: Wade Group.
- Haryamto, M. L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Pandemi COVID-19 Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *konstelasi ilmiah mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 7, 398.
- Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Komite Standar Akuntansi pemerintahan
- Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Pemerintah Pusat Indonesia

- Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Indonesia.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah. Jakarta : Pemerintahan Pusat Indonesia.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Pemerintah Pusat Indonesia
- Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jakarta : Pemerintah Pusat Indonesia.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta : Pemerintah Pusat Indonesia.
- Iqbal, M., & Abbas, T. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1-15.
- Irawan, K. I. (2021, Januari Jumat). Problematika Belanja Daerah. *PT kompas media nusantara*, hal. 1.
- Ismail, F. (2018). *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ivana, D., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Jurniawan, M. A., & Suryantini, N. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 1255-1281.

- Maharditya, N. &. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almailda.
- Nurhidayah. (2018). Pengaruh Realisasi APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis. *Jurnal Unnes MIPA*, 112.
- Polyando, P. (2020). *Jalan Tengah Desentralisasi Bagi Daerah Otonom Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Jakarta: USAID Economic Growth Support Activity (EGSA).
- Putri, A. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 85-92.
- Statistik, B. P. (2022, Desember). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi* . Diambil kembali dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/21/39a0b6b2f4ebbe0d1883e6eb/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi.html>
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Surjono, W., Putri, W. S., & Putra, R. S. (2021). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada 26

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 32-44.

Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PeKA*, 2598-3253.

USU, A. O. (2023, Januari Kamis). *Pelayanan Publik Kita Masih Buruk*. Diambil kembali dari Ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-kita-masih-buruk>

Wahyuningsih, T. (2019). *Ekonomi Publik*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Widyastuti, A. Y., & Antara. (2023, Juni Senin). *Soroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran tersedot untuk Perjalanan Dinas*. Diambil kembali dari bisnis.tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1741549/soroti-biaya-birokrasi-jokowi-ungkap-banyak-anggaran-tersedot-untuk-perjalanan-dinas>

